
Pengaruh Kemandirian Fiskal Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Pada Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Akhmad Yafiz Syam¹, Sarwani²

¹STIE Indonesia Banjarmasin, Indonesia

²Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*) Korespondensi Email: yafiz@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Abstract

This study aims to find the influence of local fiscal independence on the quality of human development. The higher fiscal independence of the region indicates a reduced dependency on the state. Local fiscal independence also shows the level of community participation in development financing in the region. This research shows the role of mediation of economic growth on the influence of local fiscal independence on the quality of human development in South Kalimantan. The results of this study prove that to improve the achievement of development-oriented to the quality of human development, local governments should focus on exerting their autonomy capabilities for economic growth, accompanied by conducive local fiscal policies and producing effective PAD potential.

Keywords: Local Fiscal Independence, economic growth, quality of human development, HDI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh kemandirian fiskal daerah terhadap terhadap kualitas pembangunan manusia. kemandirian fiskal daerah yang semakin tinggi menunjukkan semakin berkurangnya ketergantungan terhadap pusat. kemandirian fiskal daerah juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pembangunan di daerahnya. Penelitian ini menunjukkan adanya peran mediasi pertumbuhan ekonomi atas pengaruh kemandirian fiskal daerah terhadap kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berorientasi pada kualitas pembangunan manusia, pemerintah daerah sebaiknya fokus mengerahkan kemampuan otonominya untuk pertumbuhan ekonomi, diiringi dengan kebijakan fiskal daerah yang kondusif dan menghasilkan potensi PAD yang efektif.

Keywords: Kemandirian Fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan manusia, IPM

1. Pendahuluan

Hingga saat ini, pembahasan mengenai desentralisasi fiskal, yang melibatkan pelimpahan tanggung jawab fiskal pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan daerah, masih tetap hangat dibahas, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Prediksi teoritis bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi pemerintah dan meningkatkan ekonomi (lihat misalnya, Akai and Sakata (2002))_menjadi topik menarik, karena hasil-hasil studi empiris belum menunjukkan hasil yang konsisten. Khususnya di Indonesia, implementasi desentralisasi terjadi sejak tahun 1999, sebagai salah satu hasil reformasi sektor publik.

Indonesia yang meliputi 34 provinsi, masing-masing provinsi memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya.

Evaluasi terhadap keberhasilan desentralisasi ini telah beberapa dilakukan, diantaranya Badrudin and Siregar (2015) melakukan evaluasi implementasi otonomi daerah di Indonesia, dan menemukan bahwa otonomi belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jiwatami (2013), yang melakukan penelitian pada pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia periode penelitian 2008-2012, dan menyimpulkan pemerintah daerah cenderung menggunakan dana yang bersifat *block grant* lebih besar untuk kepentingan operasionalnya daripada membiayai belanja modal, ini berarti ketergantungan pemerintah daerah masih tinggi terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan operasional pemerintahan. Dalam hal hubungan antara kinerja keuangan daerah, kinerja ekonomi, dan pembangunan manusia, beberapa studi berpendapat bahwa secara empiris, ada hubungan yang signifikan antara pembangunan manusia dan kinerja ekonomi (Brata, 2002; Ranis & Stewart, 2000) Khususnya Brata (2002), yang meneliti di kawasan Indonesia Timur, menemukan bukti empiris bahwa kinerja keuangan, salah satunya rasio Kemandirian Fiskal daerah tidak memengaruhi perkembangan IPM.

Menurut Ranis and Stewart (2000) meskipun ada hubungan dua arah (*two ways relationship*) antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi itu sudah diterima secara luas, namun faktor-faktor spesifik yang menghubungkannya masih kurang dieksplorasi secara sistematis, di antara faktor tersebut adalah perlunya mempertimbangkan peran kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya pembangunan. Secara khusus, efek desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi merupakan isu kunci dalam studi teoritis konvensional dan dalam studi empiris baru-baru ini di bidang ekonomi .

Salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari capaian kualitas pembangunan manusia di daerah. Indikasi capaian kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*) (UNDP, 2019). Dari perspektif manajemen sektor publik, dapat dipastikan bahwa keberhasilan pembangunan di daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya pembangunan daerah untuk menghasilkan aset-aset produktif yang mendorong capaian kualitas pembangunan manusia di daerah (Syam, Chandrarin, & Harsono, 2019). Ide dasar inilah yang memotivasi penelitian ini untuk menjawab apakah kemandirian fiskal sebagai salah satu indikator kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan kualitas pembangunan manusia di daerah, yang diproksikan dengan IPM.

Renyaan, Ubud, Idrus, and Djumahir (2012), menunjukkan bahwa kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi mampu memperbaiki kinerja pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor efisiensi keuangan dan efektivitas pembiayaan daerah. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya kemandirian untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Supriyanto (2015) menyimpulkan bahwa kemandirian dan PAD berpengaruh positif terhadap KPPD (kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah), ini menunjukkan peran penting kemandirian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Arsyad (2015) menunjukkan bahwa secara umum kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dalam kategori rendah sekali tetapi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Penelitian lain yang dilakukan Kartikasari (2014) menyimpulkan tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah dan tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja pelayanan publik daerah.

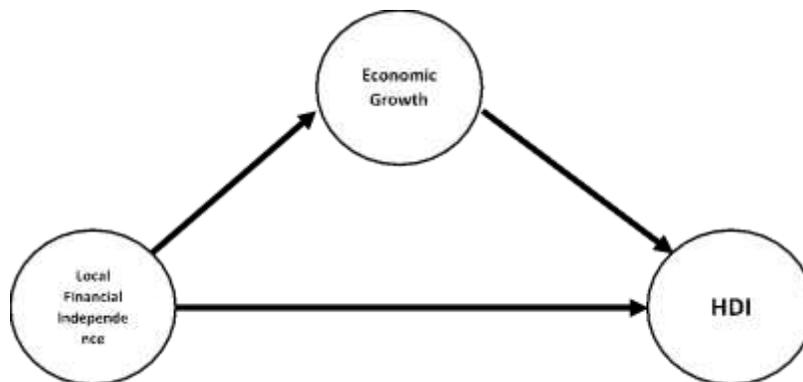
Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan temuan-temuan terdahulu sehingga membentuk model konseptual yang baru, dengan memprediksi adanya pengaruh peran kemandirian daerah terhadap potensi kualitas pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebagai pemediasi.

2. Hipotesis

Abachi and Salamatu (2012) menyatakan bahwa publikasi awal hasil penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan kinerja kemandirian pemerintah lokal dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya dilakukan oleh Tiebout (1956), Musgrave, Musgrave, and Bird (1989), dan Oates (1993). Penelitian Oates (1993) yang juga dikonfirmasi Zhang and Zou (1998) menyatakan di negara industri dan berkembang, desentralisasi fiskal yang berarti meningkatnya diskresi kebijakan anggaran di tingkat lokal berpotensi meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Abachi and Salamatu (2012) di Afrika (Nigeria), secara umum menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dan Kemandirian Fiskal memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian (Lozano & Julio, 2015) di Amerika Latin (Kolombia) menunjukkan bahwa terdapat peranan positif dan signifikan desentralisasi fiskal dan Kemandirian Fiskal lokal terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Engineer, King, and Roy (2008) menyatakan perencanaan belanja yang terbaik adalah yang mengutamakan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil studi Zaman, Izhar, Khan, and Ahmad (2012) mengungkapkan bahwa pengembangan kinerja keuangan berperan sebagai pendorong penting untuk peningkatan sumber daya manusia di Pakistan. Salah satu indikator kinerja keuangan tersebut adalah kemandirian fiskal yang diproksikan dengan rasio kemandirian keuangan daerah. Setiap indikator keuangan memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Pakistan.

Di Indonesia, studi yang serupa dilakukan oleh Singgih, Setiawan, and Damayanty (2016) terhadap provinsi di kawasan timur Indonesia, menemukan bahwa kinerja keuangan sebagian besar tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan IPM, kecuali untuk beberapa proksi di beberapa provinsi. Perbedaan hasil beberapa penelitian ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasilnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dikembangkan kerangka konseptual penelitian (gambar 1) yang selanjutnya berdasarkan kerangka tersebut dikembangkan hipotesis penelitian.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis:

- H1: Kemandirian Fiskal daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia.
- H2: Kemandirian Fiskal daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H3: Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia
- H4: Kemandirian Fiskal daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi.

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintahan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yang berjumlah sebanyak 11 kabupaten dan 2 kota. Seluruh populasi diteliti untuk masa tahun anggaran 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa profil pemerintah daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota yang telah diaudit, realisasi APBD, LRA, APBD provinsi dan kabupaten/kota. Data diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://djpk.depkeu.go.id>); Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (<http://bpk.go.id/>); Kementerian Dalam Negeri (<http://kemendagri.go.id>), (<http://otda.kemendagri.go.id>), Biro Pusat Statistik (<http://bps.go.id>), serta BPS Kalimantan Selatan. Data APBD yang dianalisis adalah data panel selama lima tahun untuk 13 kabupaten dan kota yang menggambarkan secara cross sectional seluruh variabel yang diobservasi. Sehingga jumlah data yang dianalisis adalah untuk 13 kabupaten dan kota dikali dengan 5 tahun, yaitu sebanyak 65 observed data.

Sesuai dengan rancangan dan tujuan penelitian, maka teknik analisis yang digunakan adalah metode *Structural Equation Modeling (SEM) - PLS (Partial Least Square)* dengan menggunakan program Software WarpPLS 6.0. Sebagai salah satu teknik analisis multivariat, SEM-PLS memungkinkan dilakukannya analisis terhadap serangkaian hubungan secara simultan sehingga menjadikannya teknik yang efisien. Selain itu, SEM-PLS dianggap cocok menangani ukuran sampel relatif kecil. Alasan penting lainnya untuk menggunakan PLS adalah bahwa tidak memerlukan asumsi distribusi normal (Chin, 2010; Hair, Sarstedt, Hopkins, & G. Kuppelwieser, 2014).

4. Analisis dan Pembahasan

Analisis Hasil

Hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi WarpPLS-SEM versi 6.0 menghasilkan statistik berikut.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Min	Max	Mean	SD
Local Fiscal Independence (LFI)	0.106	0.663	0.448	0.103
Ec.Growth	2.470	7.170	5.524	1.064
HDQ	60.770	77.300	69.388	3.863

Sumber: Output WarpPLS 6.0, diolah.

Tabel 1 menunjukkan tingkat kemandirian fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan IPM di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan selama 2012-2016. Kemandirian fiskal terendah adalah 0,106 atau 11 persen dan tertinggi 0,663 atau 66 persen dengan rata-rata 0,448 atau 45 persen. Berdasarkan rata-rata ini dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah ini tergolong rendah (berkisar antara 25 persen -50 persen, Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, 1990). Rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,5 persen dan terendah 2,5 persen, serta tertinggi 7,2 persen, sedangkan rata-rata HDQ (IPM) 69,4 persen, terendah 60,8 persen dan tertinggi 77,3 persen. Dibandingkan dengan angka IPM Nasional, angka rata-rata IPM kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sedikit di bawah angka IPM rata-rata nasional pada tahun 2016 yang sebesar 70,18 (BPS, 2017). Namun angka tertinggi IPM di Kalimantan Selatan berada di atas tertinggi nasional. Secara umum, dapat disimpulkan kualitas pembangunan manusia di provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan.

Analisis Model Persamaan Struktural

Pada Tabel 2 dapat diketahui R² (*R-Squared Coefficients*) masing-masing variabel laten endogen HDQ sebesar 0,31 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,45. Hal ini menunjukkan variabel eksogen yang dihipotesiskan memiliki korelasi positif terhadap variabel endogen. Sedangkan Full Collinearity VIFs menunjukkan pengujian bebas dari bias multikolinearitas, karena berada di bawah 3,3 (Kock, 2011). Begitu pula terhadap pengujian Q² (Q-squared), yang berguna untuk menguji validitas prediktif dan relevansi antara variabel prediktor dan kriteria, dengan kriteria harus lebih besar dari nol. Berdasarkan tabel 2, semua nilai Q² > 0,0, artinya semua variabel model ini dinyatakan valid. Nilai Q² Ec.Grw (0,45 > 0) dan HDQ (0,25 > 0), menunjukkan bukti bahwa nilai - nilai yang diobservasi sudah direkonstruksi dengan baik dan model yang digunakan mempunyai relevansi prediktif.

Tabel 2 Latent Variable Coefficients

	LFI	Ec.Gro	HDQ
R-squared coefficients*		0.450	0.310
Adjusted R-squared coefficients*		0.221	0.212
Full collinearity VIFs*	1.290	1.045	1.160
Q-squared coefficients*		0.452	0.253

*Sign=0.05

Sumber: Output WarpPLS 6.0.

Uji Kesesuaian Model (Fit and Quality Indices)

Sebelum melakukan pengujian lebih lanjut terhadap model, terlebih dahulu dilakukan pengujian model fit and quality indices (Goodness of Fit) untuk menentukan kelayakan model penelitian ini. *Output* dari aplikasi WarpPLS-SEM menampilkan hasil sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3 Uji Kualitas dan Kesesuaian Model

Model fit and quality indices
Average path coefficient (APC)=0.421, P=0.001
Average R-squared (ARS)=0.187, P=0.029
Average adjusted R-squared (AARS)=0.167, P=0.040
Average block VIF (AVIF)=1.040, acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.200, acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.432, small ≥ 0.1, medium ≥ 0.25, large ≥ 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if ≥ 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7

Sumber: Output WarpPLS 6.0.

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa ketiga indikator utama, yaitu Average path coefficient (APC), Average R-squared (ARS), VIF (AVIF) dan Average Full VIF (AFVIF), yang menentukan kualitas dan kesesuaian model telah memenuhi kriteria. Nilai APC= 0.421, P=0.001, berarti signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dan ARS=0.187, P<0.029, menunjukkan rata-rata koefisien jalur determinasi signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Sedangkan AVIF= 1.040 dan AFVIF= 1.200, menunjukkan bahwa model bebas dari bias multikolinearitas, karena memenuhi kriteria berada di bawah nilai ideal 3,3. Begitu pula nilai uji kesesuaian dengan metode Tenenhaus GoF (*goodness of fit*) menunjukkan nilai kesesuaian dan

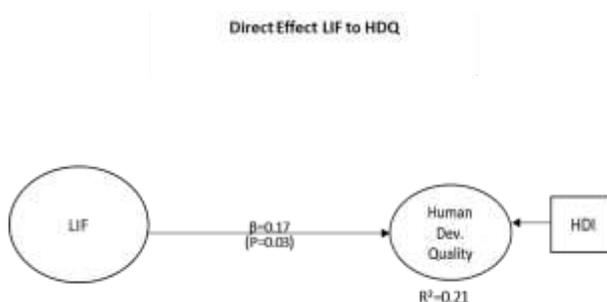
relevansi data sebesar 0.432; termasuk kategori large ≥ 0.36 . Hal ini menunjukkan bahwa model yang diajukan didukung oleh data yang relevan dan dapat diandalkan. Hasil uji *R-squared contribution ratio* (RSCR)=1.000, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1, menunjukkan rasio kontribusi yang ideal. Hasil keseluruhan uji *Fit and Quality Indices* ini menunjukkan bahwa model yang diajukan didukung oleh data yang relevan, valid dan dapat diandalkan.

Pengujian Hipotesis

Menurut Hair et al. (2014) prosedur pengujian hipotesis dengan metode SEM-PLS dapat ditempuh dengan dua tahap berikut.

1). Melakukan pengujian *direct effect*.

Sebelum melakukan pengujian perantara pertumbuhan ekonomi antara kemandirian fiskal terhadap kualitas pembangunan manusia, terlebih dahulu dilakukan pengujian *direct effect* antara kemandirian fiskal terhadap kualitas pembangunan manusia, karena ini merupakan syarat mutlak untuk memvalidasi efek hubungan tidak langsung suatu variabel mediator (pemediasi).

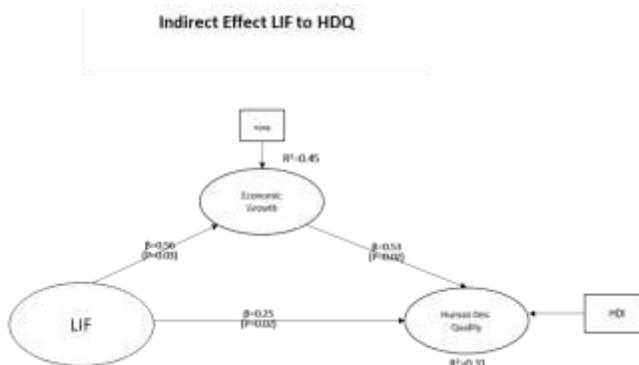


Gambar 3 Direct Effect Test

Berdasarkan Gambar 3 diketahui adanya pengaruh positif antara LIF terhadap HDQ dengan koefisien jalur sebesar 0,17 dan signifikan pada tingkat 0,05 ($p=0,03$). Temuan ini membuktikan bahwa penelitian ini menerima hipotesis H1 yang menyatakan kemandirian fiskal daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia, dengan kata lain kemandirian fiskal memiliki hubungan langsung terhadap kualitas pembangunan manusia.

2). Melakukan estimasi *indirect effect*.

Hasil pengujian *indirect effect* antara kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (Ec.Grow) melalui peran mediasi pertumbuhan ekonomi nampak pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4 Pengujian Model Indirect Effect

Hasil pengujian menunjukkan koefisien jalur dan nilai signifikansi masing-masing jalur. Jalur antara kemandirian fiskal terhadap kualitas pembangunan manusia (LIF => HDQ) dengan koefisien jalur sebesar 0,25 ($P=0,02$), menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia (hipotesis H1 diterima). Jalur antara kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (LIF => EC.GR) dengan koefisien jalur sebesar 0,56 ($P=0,03$), juga membuktikan bahwa hipotesis H2 yang menyatakan kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat diterima. Jalur antara pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas pembangunan manusia (EC.GR => HDQ) dengan koefisien jalur sebesar 0,53 ($P=0,03$), membuktikan bahwa hipotesis H3: pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia, juga dapat diterima. Hasil uji hipotesis ini secara ringkas dapat dijelaskan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4 Koefisien Path & P Value Indirect Effect

	<i>Coeff Path</i>	<i>P Value</i>
LIF \square HDQ	0,25	0,02
LIF \square EC.GR	0,56	0,03
EC.GR \square HDQ	0,53	0,02

Sumber: Output WarpPLS 6.0.

Untuk menguji hipotesis ke empat, yaitu H4: Kemandirian Fiskal daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi, dilakukan dengan cara melakukan perbandingan koefisien jalur antara langkah pertama (*direct effect test*) dan ke dua (*indirect effect test*). Hasilnya menunjukkan adanya perubahan estimasi di antara kedua pengujian. Pengaruh langsung LIF => HDQ: koefisien 0,17 ($p=0,03$) berubah menjadi koefisien:0,25($p=0,02$), terjadi peningkatan koefisiensi jalur, dan tetap signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Perubahan ini membuktikan bahwa, pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh antara kemandirian fiskal terhadap kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu hipotesis diterima.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh mediasi pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan pengujian VAF (*Variance Accounted For*), yang mengukur seberapa besar pertumbuhan ekonomi menyerap pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Jika nilai VAF di atas 80 persen, maka menunjukkan peran mediasi penuh, jika di antara 20-80 persen, maka dapat dikategorikan mediasi parsial. Namun jika kurang dari 20 persen, menunjukkan hampir tidak ada peran mediasi (Hair Jr, et al. 2014).

Tabel 5 Uji Total Effect (Perhitungan VAF Value)

Hubungan Variabel	Perhitungan	Jumlah	Kategori
LIF \square Ec.GR \square HDQ	Pengaruh langsung= FS \square Ec.Gr: 0,56 Ec.Gr \square HDQ: 0,53 (0,56X0,53)	0,30	
	Pengaruh Langsung: 0,17	0,17	
	Pengaruh Total (Total Effect)	0,47 atau 47 %	Mediasi parsial

Sumber: Output WarpPLS 6.0.

Berdasarkan analisis VAF di atas, ditemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dapat berperan sebagai mediasi dengan pengaruh total 47 persen, karena berada pada interval 20-80 persen, maka

tergolong mediasi parsial. Kesimpulannya, hasil pengujian membuktikan sekaligus bahwa hipotesis ke dua (H2) dapat diterima. Hipotesis ke dua menyatakan bahwa kemandirian fiskal daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, disimpulkan bahwa penelitian ini menerima hipotesis H1 yang menyatakan Kemandirian Fiskal daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Ini searah dengan penelitian Engineer, et al. (2008) yang menyatakan perencanaan belanja yang terbaik adalah yang mengutamakan peningkatan target human development index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Juga mengkonfirmasi hasil studi Zaman, et al. (2012) bahwa pengembangan kinerja keuangan, dalam hal ini kemandirian fiskal daerah berperan sebagai pendorong penting untuk peningkatan sumber daya manusia di Pakistan. Namun tidak mengkonfirmasi sebagian hasil studi Singgih, et al. (2016) yang menyimpulkan bahwa kemandirian tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan IPM.

Penelitian ini menerima hipotesis H2 yang menyatakan Kemandirian Fiskal daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini mendukung hasil penelitian Lozano-Espitia and Julio-Román (2015); Oates (1993); Zhang and Zou (1998); yang menyatakan di negara industri dan berkembang, desentralisasi fiskal berpotensi meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan temuan Abachi and Salamatu (2012) di Afrika (Nigeria), yang secara umum menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dan Kemandirian Fiskal memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini juga menerima hipotesis H3 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia, sejalan dengan penelitian Ranis, et al. (2000) yang membuktikan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap pembangunan manusia, terutama melalui kegiatan rumah tangga dan pemerintah; masyarakat sipil, serta, melalui organisasi swasta (Ranis, et al. 2000). Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi kesimpulan Brata (2002); dan Mirza (2012) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya yang diikuti dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini berlaku juga sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi (Brata, 2002).

Berdasarkan analisis dengan metode perhitungan VAF, ditemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dapat berperan sebagai pemediasi parsial atas pengaruh kemandirian fiskal daerah terhadap kualitas pembangunan manusia. Temuan ini menunjukkan adanya peran pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan capaian kualitas pembangunan manusia, meskipun tidak memediasi secara penuh. Peran parsial pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya diskriminan lainnya yang berperan terhadap pencapaian kualitas pembangunan manusia yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini peningkatan IPM dipengaruhi variabel-variabel lain, diantaranya faktor peran modal swasta atau usaha masyarakat sendiri yang melakukan perubahan. Sementara itu, di sisi lain, diskresi pemerintah daerah memang belum sepenuhnya difokuskan pada upaya-upaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam konteks ini terdapat mekanisme kebijakan lainnya di luar fokus pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia.

5. Kesimpulan

Temuan penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif kemandirian fiskal daerah menjadi indikator adanya kebebasan fiskal terhadap pembangunan manusia. Kemandirian yang tinggi menyebabkan berkurangnya ketergantungan daerah pada transfer pusat, sehingga menciptakan otonomi pembangunan yang lebih luas oleh daerah. Pemda akan memiliki diskresi yang luas dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menggali peluang dan potensi daerahnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya akan mendongkrak kualitas capaian target kualitas

pembangunan manusia.

6. Saran

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah, mengurangi ketergantungan dari pusat dan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Di antaranya, pemda perlu mengembangkan kebijakan kompetitif bagi perusahaan daerah, efisiensi pengelolaannya, dan mengurangi atau melikuidasi perusahaan daerah yang tidak produktif dalam menghasilkan dividen bagi pemda. Semakin luas kemandirian fiskal akan menyebabkan semakin luas pula diskresi pemerintah dalam menggunakan sumberdaya keuangan daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya, dengan memperluas lokus penelitian ataupun menambahkan variabel-variabel lainnya yang belum diuji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abachi, P., & Salamatu, I. (2012). An analysis of the effect of fiscal decentralisation on economic growth in Nigeria. *International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No, 8*.
- Akai, N., & Sakata, M. (2002). Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data For The United States. *Journal of urban economics*, 52(1), 93-108.
- Arsyad, L. (2015). *Kemandirian Fiskal Daerah Dan Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2001-2013*. Universitas Gadjah Mada,
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2015). The Evaluation Of The Implementation Of Regional Autonomy In Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7(1), 1-11.
- Brata, A. G. (2002). Pembangunan Manusia dan Kinerja ekonomi regional di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7(2).
- Chin, W. W. (2010). *Handbook Of Partial Least Squares: Concepts, Methods and Applications* Heidelberg: Springer.
- Engineer, M., King, I., & Roy, N. (2008). The human development index as a criterion for optimal planning. *Indian Growth and Development Review*, 1(2), 172-192. doi:doi:10.1108/17538250810903774
- Hair, J., Joe F, Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106-121.
- Jiwatami, S. (2013). Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*.
- Kartikasari, R., Fuad. (2014). *Pengaruh tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah, tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah dan SILPA terhadap tingkat kinerja pelayanan publik (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2006-2012)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
- Kock, N. (2011). Using Warppls In E-Collaboration Studies: An Overview Of Five Main Analysis Steps. *International Journal of e-Collaboration*, 7(2), 1-18.
- Lozano, I., & Julio, J. M. (2015). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Regional-Level Panel Data for Colombia. *Borradores de Economia*(865I).
- Musgrave, R. A., Musgrave, P. B., & Bird, R. M. (1989). *Public finance in theory and practice* (Vol. 5): McGraw-Hill New York.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 46(2), 237-243.
- Ranis, G., & Stewart, F. (2000). Strategies for success in human development. *Journal of human development*, 1(1), 49-69.
- Renyaan, J. P. A., Ubud, S., Idrus, M. S., & Djumahir. (2012). Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance (A Study on Local Government Of Papua Province). *International Journal of Business and Management Invention, Volume 1*(Issue 1), PP.16-21.
- Singgih, R., Setiawan, H., & Damayanty, S. A. (2016). Causality Analysis Between Financial Performance And Human Development Index: A Case Study Of Provinces In Eastern Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(3), 231-240.
- Supriyanto, Y. (2015). *Pengaruh Ruang Fiskal Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Indikasi Korupsi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2010-2012)*. Universitas Sebelas Maret,

-
- Syam, A. Y., Chandrarin, G., & Harsono. (2019). Effects of Fiscal Health on Human Development Index in Indonesia: Regional Government Performance Mediating Role'. *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)*, Volume. 4 Issue. 10, 50-59.
- Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. *Journal of political Economy*, 64(5), 416-424.
- UNDP. (2019). Human Development Report 2019. *Briefing note for countries on the 2019 Human Development Report: Indonesia*. Retrieved from hdr.undp.org website:
- Zaman, K., Izhar, Z., Khan, M. M., & Ahmad, M. (2012). The relationship between financial indicators and human development in Pakistan. *Economic Modelling*, 29 (2012) 1515–1523.
- Zhang, T., & Zou, H.-f. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics*, 67(2), 221-240.